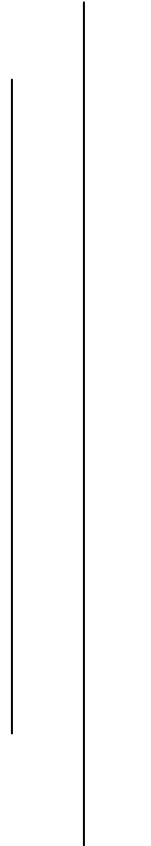


**KERUKUNAN ADALAH KEKUATAN
KETAHANAN NASIONAL**



OLEH

**IDA PANGELINSIR AGUNG PUTRA SUKAHET
KETUA ASOSIASI FKUB INDONESIA**

**DISAMPAIKAN PADA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENGUATAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA GUNA TERWUJUDNYA
HARMONI SOSIAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL
14 DAN 15 MARET 2017 DI DENPASAR**

PENGANTAR

Saya adalah manusia yang mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan dalam pikiran. Kelemahan dan kekurangan dalam perkataan. Kelemahan dan kekurangan dalam perbuatan.

Namun

Walau saya menyadari dengan segala kelemahan dan kekurangan saya, saya terus berusaha dan berupaya untuk meyakini pikiran saya, meyakini tutur kata, meyakini perbuatan dan segala apa yang ada pada diri saya. Saya harus melakukan segala apa yang menjadi kewajiban saya.

Semua itu

Demi Indonesia tercinta, demi kehidupan yang rukun , bersatu, aman, damai dan sejahtera, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Segala kesalahan saya mohon dimaafkan.

Hormat saya

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

DAFTAR ISI

Halaman

I. INDAHNYA KERUKUNAN	1
II. KERUKUNAN ADALAH KEKUATAN KETAHANAN NASIONAL & PONDASI PEMBANGUNAN	2
III. MODAL DASAR KERUKUNAN	2
IV. TANTANGAN KERUKUNAN ANTAR AGAMA	3
V. KARAKTER BANGSA INDONESIA	4
VI. SYSTEM	5
VII. NILAI	5
VIII. ETIKA	5
IX. MAYORITAS DAN MINORITAS DI INDONESIA	5
X. ANCAMAN PERPECAHAN INDONESIA	6
XI. KEMBALI KEPADA KEMURNIAN PANCASILA	7
XII. PANCASILA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA	10
XIII. MENUJU INDONESIA HEBAT	12
XIV. POTENSI INDONESIA HEBAT	13
XV. MENGAPA INDONESIA BELUM HEBAT ?	13
XVI. PERAN TOKOH AGAMA	14
XVII. SIAPA TOKOH AGAMA	14
XVIII. PERSPEKTIF KEBERAGAMAN AGAMA	15
XIX. DIMANA BUMI DIPIJAK DISANA LANGIT DIJUNJUNG	16
XX. SIKAP FKUB TERHADAP ISU ISU ANTAR AGAMA	18
XXI. BEBERAPA PEDOMAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA	19
XXII. KERUKUNAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA	20

I. INDAHNYA KERUKUNAN

Betapa indahny kerukunan

Betapa indahny persatuan

Betapa indahny kedamaian

Kerukunan, persatuan dan kedamaian

Adalah pondasi pembangunan bangsa

Menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan

Menuju masyarakat Indonesia yang damai,

Adil, makmur dan sejahtera

Itulah tujuan kita bersama

Semoga itu juga menjadi tekad kita bersama

“Kerukunan”, sedemikian besar makna kata itu, sedemikian besar ketergantungan kita pada kata itu, tanpa terasa, secara berulang tak kenal lelah kita membicarakannya, mambahasnya, juga tidak membuat kita bosan, tetapi sebaliknya telah membuat kita lebih bersemangat. Kita sangat tergantung dengan kerukunan, Indonesia yang prural sangat tergantung dengan kerukunan. Rukun dalam Islam, rukun dalam Hindu, rukun dalam Kristen, rukun dalam Katolik, rukun dalam Budha, rukun dalam Kong Hu Chu, rukun antar agama, rukun penyelenggara Negara, rukun antar Suku Bangsa, dan sebagainya adalah prasyarat yang pertama dan utama untuk pembangunan Indonesia, untuk tetap tegaknya NKRI. Perbedaan itu adalah keniscayaan, perbedaan itu juga indah. Indonesia yang prural, ada 6 (enam) agama, banyak sekali suku bangsa, banyak sekali adat dan budaya, banyak sekali bahasa daerah, itu semua adalah kekayaan yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kalau dikelola dengan manajemen yang tepat maka kekayaan ini akan menjadi potensi hebat yang menjadikan bangsa dan negara Indonesia adil, makmur, damai, sejahtera dan kuat. Namun kalau terjadi mismanagemen atau salah kelola, tidak mustahil kekayaan ini akan menjadi musibah, konflik yang berkepanjangan, yang tidak memberikan kesempatan bangsa ini membangun, mengingat juga issue agama adalah issue yang paling sensitif, konflik antar agama akan cenderung berkepanjangan dan sangat sulit dipulihkan, oleh karena itu

janganlah pernah terjadi konflik antar agama sekalipun. Oleh karena itu pula tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kerukunan antar agama di Indonesia adalah HARGA MATI.

Dalam kaitan mencegah terjadinya konflik agama, kemudian memelihara dan meningkatkan kualitas kerukunan, maka sangat pentinglah kedewasaan beragama, sangat pentinglah usaha-usaha pendewasaan beragama, sangat pentinglah pengelolaan kehidupan beragama dalam bingkai keindonesiaan. Untuk memantapkan upaya-upaya demikian maka peran majelis-majelis agama, peran tokoh-tokoh agama dan peran FKUB adalah sangat penting dan strategis.

II. KERUKUNAN ADALAH KEKUATAN KETAHANAN NASIONAL DAN PONDASI PEMBANGUNAN

Kerukunan terutama kerukunan antar agama mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sangat strategis didalam pembangunan bangsa dan Negara. Karena itu semua pihak sepatutnya paham bahwa kerukunan akan menciptakan keamanan dan kedamaian. Sedangkan keamanan dan kedamaian adalah prasyarat pembangunan. Mustahil bagi Negara, Pemerintah atau siapa saja akan mampu bekerja dengan baik atau membangun dengan baik apabila dalam suasana yang tidak aman, tidak damai, dalam suasana kacau balau karena pertikaian atau apalagi dalam keadaan perang. oleh karena itu kerukunan antar umat beragama sudah seharusnya menjadi tugas utama Negara / Pemerintah untuk membangun kerukunan antar agama, dan mendukung sepenuhnya upaya – upaya dan atau lembaga – lembaga kerukunan antar umat Bergama.

III. MODAL DASAR KERUKUNAN

Yang menjadi modal dasar kerukunan adalah :

- 1) Pemahaman yang baik dan benar terhadap agama.
- 2) Pemahaman yang baik terhadap Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
- 3) Nasionalisme dan Patriotisme.

4) Kearifan Lokal.

5) Pemahaman yang baik terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

IV. TANTANGAN KERUKUNAN ANTAR AGAMA

Kerukunan antar agama atau antar umat beragama di Indonesia adalah sangat penting dan strategis untuk pembangunan bangsa dan negara, dan untuk menjaga tetap tegaknya NKRI. Namun tantangan untuk membangun, memelihara dan merawat kerukunan tersebut tidaklah mudah, bahkan cukup berat. Mengingat kerukunan itu selalu bersifat dinamis, bisa berubah ubah sehingga tidak ada jaminan hidup rukun terus menerus. Kerukunan tidak diturunkan dari langit, oleh karena itu kerukunan antar umat beragama tidak cukup sekedar diupayakan, tetapi harus secara terus menerus diperjuangkan. Tantangan pokok terhadap kerukunan sekarang ini adalah :

1. Terjadinya penyimpangan - penyimpangan terhadap Pancasila
2. Pemujaan terhadap Demokrasi dan HAM yang berlebihan sehingga kebablasan.
3. Belum dipahaminya kedudukan penting kerukunan terutama kerukunan antar agama, dan tidak dipahaminya peran FKUB
4. Belum membuminya nilai-nilai agama-agama terutama tentang cinta kasih, kebersamaan, persaudaraan, kesetaraan agama-agama , penghormatan kepada setiap agama dan toleransi.
5. Masih banyak umat beragama yang tidak begitu paham dengan agamanya, dan dimana-mana menonjolkan eksklusifitas.
6. Tidak ada satu negarapun yang senang negara lain kuat, apalagi lebih kuat dari negaranya.
7. Kesejahteraan masyarakat yang kurang memadai.
8. Kecerdasan masyarakat yang kurang.
9. Kurangnya keadilan.

V. KARAKTER BANGSA INDONESIA

Membangun dan memelihara kerukunan antar agama dan atau kerukunan antar umat beragama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakter bangsa Indonesia, system yang dianut, nilai yang dimiliki dan etika antar agama.

Karakter bangsa Melayu pada umumnya, khususnya bangsa Indonesia adalah berkarakter komunal atau bangsa komunal. Hal ini berbeda dengan bangsa barat yang berkarakter individualis. Orang Melayu atau orang Indonesia selalu ingin berkumpul, selalu ingin bersama-sama dengan komunitasnya atau kelompoknya, ,mulai dari kelompok umum sampai dengan kelompok yang paling khusus (keluarga). Kelompok-kelompok ini pada umumnya dikenal dengan SARA yaitu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan. Kebaikan dari karakter komunal ini adalah berupa gampang terbangunnya semangat persaudaraan, semangat kebersamaan (gotong royong), saling bantu membantu, tenggang rasa yang kuat didalam sesama kelompok, mulai dari kelompok kecil yaitu keluarga, yang kemudian membesar menjadi kelompok lingkungan, suku, ras, agama dan bangsa. Namun sebaliknya juga akan sangat rentan dengan “semangat keberpihakan pada kelompok” kalau terjadi masalah atau konflik antar kelompok, lebih-lebih antar suku atau agama maka belum apa-apa tanpa menganalisa terlebih dahulu secara obyektif, masing-masing sudah berpihak pada kelompoknya. Jadi negatifnya adalah kelompok komunal bisa sangat subyektif. Sedangkan karakter individualis, pada umumnya dimiliki oleh bangsa barat, mereka lebih suka hidup sendiri bahkan mereka lebih suka hidup terpisah dengan keluarganya sendiri, sifat mereka adalah “elu-elu gua-gua”. Dikalangan karakter individualis akan sangat sulit dibentuk sistem kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong. Mereka tidak begitu mengikatkan diri dengan kelompoknya mulai dari kelompok keluarga, lingkungan, suku maupun agama, sehingga positifnya adalah mereka tidak gampang terjebak didalam masalah atau pertikaian antar kelompok SARA, juga mereka akan mudah membaur dengan kelompok SARA manapun.

VI. SYSTEM

System ketatanegaraan Indonesia dibentuk juga salah satunya adalah dengan mempertimbangkan karakter komunal bangsa Indonesia, dimana dalam hubungan antara negara dan agama disepakati system Bukan Negara Agama tetapi juga Bukan Negara Sekuler. Jadi Indonesia tidak berdasarkan agama tertentu tetapi sangat menghormati dan memperhatikan kedudukan agama-agama, dan mengatur lalulintas antar agama atau kehidupan antar umat beragama.

VII. NILAI

Hubungan antar umat beragama atau kerukunan antar agama di Indonesia dibangun atas dasar nilai-nilai :

1. Nilai agama-agama
2. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika
3. Nilai Kearifan Lokal, misalnya semangat menyama braya.

VIII. ETIKA

Untuk membangun, memelihara dan meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama di Indonesia, maka Bangsa Indonesia juga melaksanakan atau memiliki etika-etika antara lain sebagai berikut:

1. Dimana bumi dipijak disana langit dijunjung
2. Menghormati ciri khas : agama, adat, budaya disetiap daerah, dan berusaha memelihara dan mempertahankan ciri-ciri tersebut.
3. Menghormati setiap keyakinan agama, atau agama orang/kelompok lain.
4. Tidak memandang agama kelompok lain lebih rendah.
Tidak menjelek-jelekkkan agama kelompok lain.

IX. MAYORITAS DAN MINORITAS DI INDONESIA

Masalah mayoritas dan minoritas disamping memang sebenarnya tidak perlu bahkan tidak patut lagi diwacanakan di NKRI ini, karena memang NKRI dibentuk tidak dengan berdasarkan asas Mayoritas dan Minoritas. Tetapi juga pemahaman tentang adanya mayoritas dan minoritas di dalam NKRI ini perlu diluruskan.

Secara demografi (kependudukan) secara keseluruhan maka jumlah umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, tetapi Umat Islam terkonsentrasi di Pulau Jawa. Namun secara geografi (wilayah) maka 4 agama memiliki wilayah mayoritas dan minoritas.

Islam adalah mayoritas di Jawa Sulawesi Selatan, Aceh, Padang, dan lain lain wilayah. Namun sebagai minoritas di Papua, NTT, Bali dan Sulawesi Utara.

Kristen adalah mayoritas di Papua dan Sulawesi Utara, tetapi minoritas di daerah-daerah lain.

Khatolik adalah mayoritas di NTT tetapi minoritas di daerah-daerah lain.

Hindu adalah mayoritas di Bali tetapi minoritas di daerah-daerah lainnya.

Jadi dari sudut pandang geografis maka tidak ada kelompok agama yang menjadi mayoritas mutlak di Indonesia. Padahal pecahnya sebuah negara akan selalu berdasarkan mayoritas pada wilayah/daerah, bukan pada mayoritas penduduk secara keseluruhan.

X. ANCAMAN PERPECAHAN INDONESIA

Selama ini di beberapa daerah di Indonesia sudah sering terjadi konflik yang bernuansa antar agama. Kita semua bersyukur karena konflik-konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, suasana daerah yang bersangkutan cepat kembali kondusif. Kecuali konflik Ambon dan Poso yang agak berlarut-larut.

Setelah penulis analisa, ternyata cepatnya konflik tersebut dapat diatasi bukanlah disebabkan menonjolnya peran pemerintah dan atau peran TNI/POLRI. Namun, cepatnya konflik diakhiri lebih karena beberapa hal yaitu:

1. Yang merasa kecil, lemah, minoritas selalu mengalah (walaupun masih jengkel, menggerutu)
2. Yang merasa kecil, lemah, minoritas selalu diam atau tidak bereaksi.
3. Yang merasa kecil, lemah atau minoritas bahkan lari menyelamatkan diri.

Mengingat keyakinan agama adalah keyakinan yang begitu dalam sehingga apapun sering dikorbankan demi keyakinan dan kehormatan agama, maka kita bangsa Indonesia tidaklah dapat selalu mengharapkan keadaan cepat pulihnya konflik antar agama karena sebab-sebab di atas. Ada kemungkinan suatu saat yang kecil, lemah atau minoritas akan tetap melawan, yang kemudian akan menimbulkan terjadinya

“perang sipil”. Kalau hal ini terjadi maka perang sipil antar agama di suatu daerah tidak mustahil akan menjalar ke berbagai wilayah Indonesia.

Kalau ini terjadi maka negara, pemerintah termasuk TNI dan POLRI akan sangat sulit menguasai keadaan. NKRI pun terancam.

XI. KEMBALI KEPADA KEMURNIAN PANCASILA

Judul kembali kepada kemurnian Pancasila ini tentunya sudah mengisyaratkan bahwa telah terjadi gerak tingkah hidup dan kehidupan di Indonesia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya dan banyak tokoh dan pengamat kenegaraan yang sependapat dengan saya, memang justru dalam era reformasi ini Pancasila, Bhineka Tunggal Ika sudah jarang terdengar apalagi sering diteriakan?? Nasionalisme, Patriotisme sudah memudar. Kenegarawanan yang memang akarnya adalah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika tentunya juga sangat susah ditemukan, ataupun kalau masih banyak ada, susah ditemukan karena yang baik baik lebih sering tidak mendapat kesempatan. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika kalau pun kadang kadang terdengar, kadang kadang diucapkan, dengan ke 5 sila Pancasila itu.....tapi sering tanpa pemahaman yang utuh lagi, sering tanpa makna. Anak anak siswa dan mahasiswa umumnya sudah cukup senang hanya dengan mampu menghafal ke 5 sila itu.....walaupun tanpa paham maknanya, apalagi menghayatinya..... Lalu bagaimana dengan pelaksanaannya, pengamalannya ?? Tentu sudah tidak perlu dikatakan lagi.

Keadaan ini sungguh menyedihkan dan sangat mengkhawatirkan. Semua ini terjadi justru setelah kemenangan reformasi, yaitu karena euforia kemenangan yang berlebihan. Hampir semua sistem yang berbau orde baru diberangus, diganti atau bahkan dilenyapkan tanpa pengganti, sering tanpa memandang apakah yang diberangus, diganti atau dilenyapkan itu masih baik atau memang benar - benar jelek untuk negara kita, pancasila sudah bukan menjadi pelajaran utama lagi, sudah tanpa pedoman, bagaimana anak-anak kita atau bangsa kita melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan ini karena sempitnya waktu saya hanya membatasi 2 (dua) masalah hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikaji dari

silanya pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pancasila dengan ke 5 silanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, satu sila dengan yang lainnya akan saling berkaitan dan sangat saling mempengaruhi. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membahas secara singkat pemahaman dan makna dan sekaligus hubungan antara kedua sila ini yang sangat erat dan saling mempengaruhi.

Penyimpangan dari sila ke 4 pancasila telah menimbulkan sistem demokrasi yang liberal bahkan sangat bebas yang sering saya sebut demokrasi yang kebablasan. Kebebasan sekarang ini yang sering bertameng atau bahkan karena ketakutan yang berlebihan kepada hak asasi manusia, karena pemahaman terhadap kedudukan dan hakekat hak asasi manusia itu juga sering keliru. Kebebasan dan hak berbicara, kebebasan dan menulis, kebebasan media lebih-lebih kebebasan media sosial, kebebasan dan hak dipilih dan memilih, kebebasan berdemo dan sebagainya, bahkan yang menyangkut sara sekalipun yang sungguh sudah kebablasan. Hal ini akhirnya sangat berpengaruh kepada upaya pelaksanaan sila ketuhanan yang maha esa, dimana sila pertama ini mengamanatkan kebebasan memeluk agama, kebebasan melaksanakan ibadah agama, saling menghormati, saling bertoleransi, guna menuju suatu kerukunan hidup antar umat beragama yang berdasarkan cinta kasih, kebersamaan, dan persaudaraan akhirnya menjadi jauh lebih berat, sehingga tidak cukup dengan upaya-upaya biasa, tetapi juga harus melalui perjuangan.

Masalah demokrasi ini, akhirnya sampai kepada pertanyaan, demokrasi yang bagaimana sebenarnya yang akan dituju? Yang mengutamakan kualitas atau sekedar supaya disebut negara yang paling demokrasi?? Padahal tidak sadar kalau disanjung-sanjung untuk akhirnya dihancurkan. Apakah akan menuju demokrasi intelektual atau demokrasi jalanan atau demokrasi pengerahan massa, atau hanya sekedar menang dengan suara yang terbanyak??? Banyak sekali orang lupa dan atau pura-pura lupa karena dimabukan oleh kepentingan pribadi ataupun kelompok, bahwa demokrasi itu harus punya dasar yang kuat dari intelektualitas dan kesejahteraan. Demokrasi harus dilakukan oleh orang-orang yang paham terhadap masalah yang akan diambil keputusannya. "democracy without intellectuality and

properity, it doesn't work " dengan demikian bangsa kita mestinya belum boleh melaksanakan praktek demokrasi liberal, dan demokrasi one man one vote untuk semua rakyat. Kecuali bangsa kita sudah mampu mencapai intelektualitas minimum 80% kemakmuran 90%. Dari uraian ini jelas kebebasan - kebebasan yang saya uraikan diatas adalah kebablasan. Sedangkan sistem pemilu dan pilkada juga salah kalau dipandang dari makna sila ke 4 pancasila.

Mengenai prinsip prinsip sila ke pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat diuraikan secara sangat - singkat sebagai berikut.

1. Bahwa negara kita tidaklah negara agama, tidak berdasarkan atas satu agama tertentu.
2. Bahwa negara kita tidak juga negara sekuler.
3. Walaupun bukan negara agama tetapi negara kita dan bangsa kita adalah bangsa yang religious, bangsa yang beragama.
4. Negara dalam dokumen dokumen negara tidak akan mencantumkan nama Tuhan berdasarkan salah satu agama, melainkan selalu mencantumkan Tuhan Yang Maha Esa, atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi harus dg kata Tuhan, bukan Ida Sang Hyang Widhi, bukan Sang Budha, bukan Yesus, bukan Allah, dan juga bukan Thian.
5. Tidak ada satu agamapun yang menguasai Negara .
6. Negara juga tidak akan menguasai agama agama.
7. Negara hanya terbatas mengakui dan mengatur lalu lintas agama agama dan atau antar agama.
8. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ibadahnya.
9. Negara bertanggung jawab terhadap kerukunan antar agama.
10. Kaidah kaidah agama yang tidak dapat berlaku umum, tidak boleh menjadi hukum negara.
11. Hukum negara tidak boleh bertentangan dengan hukum - hukum agama. Tetapi hukum negara tidak harus sama dengan hukum agama.
12. Setiap agama mempunyai hak otonom dalam negara. Sehingga negara tidak boleh mengintervensi hal- hal yang bersifat materiil dari suatu agama.

13. Masalah masalah sara, adat dan budaya tradisi termasuk agama tidak boleh didemokrasikan berdasarkan suara terbanyak dalam mekanisme negara.
14. Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sangat selaras dengan agama - agama.
15. Negara melindungi dan memperlakukan sama dan secara adil terhadap semua agama.

XII. PANCASILA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Negara Kesatuan, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah **kontrak sosial atau Perjanjian Bangsa** berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebuah perjanjian sebelum didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kalau saja sebelum 17 Agustus 1945 tidak terdapat kesepakatan tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan pernah terwujud. Wilayah Indonesia ini mungkin akan terdiri dari lebih 20 negara yang terpisah dan berdaulat dan bercirikan masing – masing suku bangsanya, budayanya, agamanya dan adat istiadatnya. Oleh karena sebagai Perjanjian Bangsa itulah maka Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diutak atik oleh siapapun dan oleh lembaga apapun. Karena kalau Pembukaan UUD 1945 yang berisi Pancasila itu diubah maka akan berkonsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia bubar, dan daerah-daerah pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke posisi semula sebelum 17 Agustus 1945. Esensi dari Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Perjanjian Bangsa adalah setiap daerah berkewajiban mendukung tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembangunan bangsa. Sedang dilain pihak Negara (Pemerintah) berkewajiban untuk mengayomi, melindungi dan mensejahterakan daerah –daerah. Mengayomi dan melindungi setiap **local genius**, agamanya, budaya, adat istiadat yang secara historis telah menjadi tuan di daerahnya, jangan sampai terdesak atau terpinggirkan oleh pergeseran demografi atau pembangunan – pembangunan yang salah arah (jangan sampai terjadi **cultural shock**). Hal ini penting untuk ditaati agar Pancasila dan Bhineka

Tunggal Ika sebagai perjanjian dasar antara kita tidak hilang ciri – cirinya hanya karena bertameng **globalisasi**.

Kalau Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang mempersatukan bangsa kita yang menjadi perjanjian kita, secara signifikan tidak lagi dihormati atau bahkan diubah, maka perjanjian berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun batal dan daerah – daerah akan mempunyai hak untuk kembali kepada keadaan sebelum 17 Agustus 1945.

Oleh karena demikian marilah kita pelihara dan hormati setiap daerah di Indonesia ini dengan ciri agamanya, budayanya dan adat istiadatnya. Jangan coba – coba ada keinginan yang besar menghegemoni yang kecil apalagi yang lebih kecil ingin menghegemoni yang besar. Singkat kata Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

mensyaratkan kita semua Bangsa Indonesia untuk mampu menjaga dan melestarikan jati diri setiap daerah seperti Aceh dengan wajah, jiwa dan kultur islaminya, demikian juga Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan ciri khas dan jati dirinya masing – masing, Irian , NTT, Manado dengan ciri Kristennya, Bali dengan nuansa keagamaan, adat dan budaya Hindunya, demikian seterusnya untuk seluruh daerah pendukung N K R I.

Dengan kata lain bahwa yang berbhineka itu adalah Indonesia yaitu di dalamnya terdapat berbagai corak dan ragam agama, suku bangsa, budaya, adata-istiadat, bahasa dan lain-lain. Namun bukan masing-masing daerah yang harus berbhineka.

Esensi lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Perjanjian Bangsa adalah bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak berdasarkan agama, namun juga tidak merupakan negara sekuler, kedudukan agama-agama, adat-adat dan budaya-budaya terhadap negara dan pemerintah adalah otonom. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mengakui, melindungi, dan mengayomi agama-agama, adat-adat dan budaya-budayanya, namun tidak akan pernah mengintervensi secara substansial dan atau menjadi lembaga pemutus masalah-masalah intern agama-agama, adat-adat, dan budaya-budaya. Dan sebaliknya tidak boleh terjadi juga ada agama, budaya, adat

tertentu yang mengkooptasi negara. Itulah sebabnya sepatutnya tidak boleh terjadi ada paham-paham dan atau hukum agama, adat, suku bangsa dan budaya yang tidak bersifat universal untuk menjadi kaidah-kaidah atau hukum negara.

XIII. MENUJU INDONESIA HEBAT

Apa yang dimaksud Indonesia hebat ? Kata hebat akan selalu dikaitkan dengan kemampuan, bukan dengan keadaan. Kemampuan untuk melaksanakan dan berhasil dalam pekerjaan – pekerjaan besar, kemampuan dan keberhasilan dalam mewujudkan cita – cita besar. Kata hebat juga akan dikaitkan dengan keunggulan, yaitu mampu lebih unggul terhadap yang lain, atau yang lain – lainnya, atau dengan kata lain mampu mejadi juara dalam banyak hal yang penting.

Indonesia hebat adalah Indonesia yang mampu mempertahankan, melaksanakan dan mencapai hal – hal sebagai berikut .

- 1) Mampu mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai Falsafah Bangsa.
- 2) Mampu mempertahankan NKRI yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke.
- 3) Indonesia yang rukun, bersatu, aman dan damai.
- 4) Indonesia yang sejahtera lahir – bathin, yang adil dan makmur. (Gemah Ripah Lohjinawi Tata Tentram Kerta Raharja)
- 5) Indonesia yang berdaulat dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya dengan kata lain indonesia yang tidak bisa ditekan atau didikte oleh Negara lain atau pihak lain manapun.

Indonesia yang lebih unggul dalam bidang kerukunan, persatuan, keamanan, ekonomi dan kesejahteraan.

XIV. POTENSI INDONESIA HEBAT

Secara potensi, Indonesia adalah hebat, lebih unggul dari Negara manapun di dunia. Beberapa ciri potensi Indonesia hebat:

1. Mempunyai wilayah yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
2. Jumlah penduduk yang besar yaitu sekitar 240 juta, dengan generasi muda yang sangat banyak.
3. Kekayaan budaya dengan keberagaman adat – budaya terkaya di dunia.
4. Kekayaan laut terkaya di dunia, keindahan bawah laut terindah di dunia.
5. Berwujud Nusantara atau kepulauan.
6. Kekayaan alam yang luar biasa : tanah yang subur, kaya akan hutan, gunung, danau, mata air, sungai, sawah, ladang, kebun, pertambangan (minyak, batubara, emas, perak, tembaga, besi, timah, geothermal, dan lain lain, boleh dikatakan Indonesia punya segalanya.

Musim yang mendukung : hanya ada 2 musim yang datangnya cukup teratur yaitu musim hujan dan musim tidak hujan. Suhu udara tidak pernah ekstrem, tidak pernah terlalu panas, tidak pernah terlalu dingin. Tidak ada musim Cyclone atau Tornado.

XV. MENGAPA INDONESIA BELUM HEBAT ?

Indonesia yang kenyataannya telah diberi karunia Tuhan yang lebih dari bangsa – bangsa lain, sudah 71 tahun merdeka, atau mulai membangun, tetapi ternyata masih jauh dari hebat, ,masih sangat ketinggalan dari Negara – Negara lain yang miskin potensi. Ketertinggalan Indonesia tiada lain disebabkan oleh hal yang utama yaitu “ kegagalan Character Building “ sedangkan penyebab berikutnya adalah banyaknya terjadi salah kelola atau “ mismanagement “ dan korupsi yang masih banyak terjadi. Ancaman lain yang sangat berbahaya adalah ancaman teroris dan narkoba.

XVI. PERAN TOKOH AGAMA

Kalau disimak penyebab ketertinggalan Indonesia dalam kancah asia atau dunia dalam hal pembangunan, yaitu kegagalan pembinaan SDM (character building), mismanagement (salah Kelola), korupsi, teroris dan narkoba. Untuk Management Negara mungkin bukanlah menjadi porsi para tokoh agama, tetapi untuk peyebab ketertinggalan yaitu kegagalan “character building“, kemudian korupsi, teroris dan narkoba maka peran tokoh agama adalah sangat penting dan strategis. Namun hal ini sangat bergantung seberapa serius Negara/Pemerintah memfasilitasi para tokoh agama, dan seberapa serius dukungan yang diberikan kepada para tokoh agama. Disamping itu juga telah dinyatakan bahwa kerukunan adalah pondasi pembangunan, terutama kerukunan antar umat agama (paling sensitif), maka disini pula peran para tokoh agama, terutama FKUB sangatlah penting dan strategis.

Indonesia akan berhasil menjadi hebat akan sangat tergantung seberapa besar para tokoh agama diperankan oleh negara/pemerintah. Indonesia akan berhasil menjadi hebat apabila sebagian besar pemimpinnya adalah pemimpin yang religius. Apabila para politikusnya atau para pejabatnya juga religius. Apabila para pengusahanya kebanyakan adalah pengusaha yang religius. Masyarakatnya adalah masyarakat modern yang religius, menguasai “high tecnology” tetapi tetap religius. Apabila bangsa Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang religius. Untuk menjadikan bangsa ini menjadi religius maka dukungan negara/pemerintah untuk lebih memberi peran kepada tokoh-tokoh agama adalah sesuatu yang bersifat mutlak.

XVII. SIAPA TOKOH AGAMA

Tokoh agama adalah pemimpin – pemimpin agama yang memahami dengan baik ajaran agamanya, selalu berupaya berpikir, berkata dan berbuat sesuai dengan tuntunan agama, yang mempunyai kemampuan memimpin, dan dijadikan panutan oleh umatnya dan masyarakat.

XVIII. PERSPEKTIF KEBERAGAMAN AGAMA

Saya adalah seorang dengan background Hindu, karena saya kebetulan lahir di Bali dalam keluarga Hindu. Jika saya lahir di Timur Tengah, kemungkinan besar saya Muslim. Kalau saya lahir di Roma mungkin saya Katolik, atau kalau saya lahir di Bangkok mungkin saya Budha. Sebagai orang Bali, Sebagai orang Hindu, ijinkan saya menyentuh anda dengan kearifan Hindu, kearifan Bali yaitu “Vasudeva Kothumbhakam”; dunia ini adalah sebuah keluarga besar, kita semua adalah bersaudara. Atau saya sentuh anda dengan “Tat Twam Asi”; kita adalah sama, bila anda senang saya lebih senang, bila anda sedih saya sedih, bila anda sakit atau menderita saya ikut merasa sakit. Kemudian mengapa di banyak daerah, di banyak negara masih kita saksikan atau kita dengar terjadi peristiwa-peristiwa krusial, kekerasan, intimidasi, perkelahian bahkan peperangan yang disebabkan oleh perbedaan agama atau dengan mengatasi namakan agama? Untuk menjawab pertanyaan besar ini maka terlebih dahulu harus kita “clear”kan definisi agama, apa agama itu? Dalam pandangan saya: agama adalah setiap jalan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yang yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mengajarkan kebaikan, yang indah, yang penuh cita kasih terutama kepada sesama manusia dan kepada alam. Dan mengapa Tuhan tidak menciptakan hanya 1 agama? Karena Tuhan mempunyai banyak jalan, bahkan banyak sekali jalan.

Dari berbagai arah jalan manusia bisa tempuh untuk menuju Tuhan. Tuhan juga mempunyai banyak sekali nama, mempunyai banyak identifikasi. Itulah sebabnya tidaklah sepatutnya memasalahkan berapa banyak ada agama di dunia ini; satu, dua, tiga, enam, sepuluh bahkan mungkin seratus atau ratusan. Satu hal dimana kita harus sepakat bahwa “semua agama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa”. Tidak menjadi masalah tentang perbedaan cara, perbedaan cara sembahyang, perbedaan cara memuja, perbedaan cara berpuasa, perbedaan upacara, apalagi perbedaan berpakaian, dan sebagainya. Namun, semua agama-agama memiliki kesamaan satu sama lain yaitu : diciptakan oleh Tuhan, mempunyai tujuan yang sama, mengikuti jalan Tuhan untuk membangun harmoni, suasana yang damai, yang sejahtera, negara yang sejahtera, dunia yang sejahtera, membangun dunia yang damai, sehat, sejahtera dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita sudah yakin bahwa

agama-agama diciptakan oleh Tuhan maka semua agama adalah indah luar biasa, baik luar biasa dan bahkan sempurna. Oleh karena demikian, sebenarnya adalah mustahil kalau ada perselisihan antar agama apalagi perang antar agama. Yang terjadi sebenarnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mengerti agama-agama, tidak mengerti hakekat Tuhan, bahkan tidak Paham dengan agamanya sendiri, kemudian dengan mengatas namakan Tuhan atau agama memusuhi bahkan memerangi orang-orang atau umat lain. Tugas insan beragama yang faham Tuhan dan agama sekarang ini adalah mensosialisasikan, mempromosikan, mengglobalkan pemahaman yang benar tentang Tuhan dan agama. Sehingga akan terbangun suasana yang lebih toleran, yang saling menghormati untuk selanjutnya akan tercipta dunia yang dicita-citakan yaitu dunia yang aman tenteram, kerta raharja, dunia yang damai membahagiakan.

Perspektif agama, perspektif keberagaman agama yang demikian adalah perspektif ke-Indonesiaan. Bahwa kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, kita adalah orang Indonesia yang beragama Hindu, kita adalah orang Indonesia yang Kristen, Katholik, Budha dan Kong Hu Chu, bukan dalam kalimat yang sebaliknya.

Dengan demikian, perspektif keberagaman agama di Indonesia adalah membentuk Islam yang Indonesia, Hindu yang Indonesia, Kristen yang Indonesia, Katholik, Budha dan Kong Hu Chu yang Indonesia.

Kehidupan keberagamaan dan keberagaman agama yang berbingkai Indonesia adalah kehidupan yang penuh dengan semangat kebangsaan, jiwa kekeluargaan, semangat kebersamaan, yang penuh toleransi dan salaing menghormati dalam kesetaraan.

XIX. DIMANA BUMI DIPIJAK DISANA LANGIT DIJUNJUNG

Pepatah yang berbunyi “ dimana bumi dipijak disana langit dijunjung “ memang adalah pepatah suku Minang namun bahasa itu telah membumi di Indonesia karena memakai bahasa Melayu, karena telah dikenal luas maka bahasa itu sering dipakai agar lebih cepat dimengerti dan ditangkap maknanya. Padahal esensi pepatah tersebut telah dimiliki oleh hampir setiap daerah dengan bahasa yang berbeda – beda tentu saja.

Bahkan kompetensi hukum secara internasionalpun telah memiliki makna tersebut yaitu kalau seseorang berada apalagi melakukan kegiatan di negara lain (luar negeri) maka dia terikat untuk mentaati hukum – hukum yang berlaku di negara tersebut. Kalau kaki kita berada di Australia maka kita mau tidak mau harus menghormati dan terikat oleh hukum Australia. Kompetensi hukum ini berlaku secara internasional. Di Bali sebenarnya telah dikenal sejak dahulu kala dalam istilah hukum adat : “ Desa Kala Patra “ ataupun “Desa Mawa Cara”. Desa Kala Patra berarti setiap tindakan kita harus menyesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan dimana kita berada. Desa Mawa Cara berarti setiap daerah memiliki cara masing – masing baik aturan tata tertibnya (awig – awignya) maupun tradisinya. Setiap pendatang yang masuk kesana, lebih – lebih kalau ingin berdomisili mau tidak mau harus menghormati dan mentaati “ Desa Mawa Cara “ daerah tersebut. Bahkan misalnya sebagai orang Klungkung yang berdomisili di Tabanan tidaklah dapat seenaknya membawa dan melaksanakan tradisi Klungkung-nya di Tabanan. Yang bersangkutan haruslah menyesuaikan tradisinya, atau paling tidak meminta ijin (mesadok) terlebih dahulu kepada prajuru wilayah tersebut. Demikian juga bagi orang – orang Bali yang menjadi pendatang di daerah lain atau di negara lain, hendaknya mampu dan bahkan harus mampu menghormati dan ikut memelihara tradisi hukum setempat dan tunduk kepada hukum – hukum yang hidup di daerah tersebut. Menyedihkan kalau kedatangan kita bermukim di daerah tersebut kemudian merusak tradisi atau hukum suatu daerah, karena hal ini sangat bertentangan dengan etika hidup yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian tidak saja di Bali, tetapi dimanapun di daerah Indonesia, bahkan dimanapun di bumi ini, bagi para pendatang hendaknya selalu memahami dan melaksanakan pepatah Minang yang telah menjadi pepatah umum bersama yaitu dimana bumi dipijak disana langit dijunjung, demi kehidupan yang sejahtera dan harmonis berdasarkan Pancasila dan falsafah Bhineka Tunggal Ika.

Prinsip Desa Kala Patra, atau Desa Mawa Cara atau Dimana Bumi Dipijak Disana Langit Dijunjung adalah sebuah prinsip hukum universal yang merupakan hukum antar hukum, hukum antar golongan, antar Daerah ataupun antar Bangsa.

XX. SIKAP FKUB TERHADAP ISU ISU ANTAR AGAMA

Dalam rangka melaksanakan tugas – tugas, mewujudkan, membina, memelihara dan meningkatkan kualitas kerukunan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menjadi kewajiban Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), khususnya FKUB Bali untuk selalu memperhatikan, bersikap dan memberi tanggapan terhadap semua isu, peristiwa yang berkenaan dengan hubungan antar agama.

Perhatian Kita bersama, tanggapan dan sikap yang arif dan bijaksana harus senantiasa diberikan dan atau diwujudkan mengingat isu agama adalah isu yang paling sensitif diantara isu – isu paling sensitif (isu SARA). Mengingat juga kerukunan adalah sebagai pondasi keamanan dan perdamaian, yang berarti sebagai pondasi pembangunan.

Terhadap isu-isu antar agama, FKUB mempunyai sikap dan atau pandangan sebagai berikut:

1. Bahwa kerukunan, terlebih-lebih kerukunan antar agama adalah sangat penting dan sangat strategis sebagai pondasi pembangunan. Keberhasilan mewujudkan kerukunan, keamanan dan perdamaian akan memberikan kesempatan kepada Negara untuk mampu membangun dengan lebih baik dan maximal.
2. Bahwa isu agama adalah isu yang paling sensitif diantara isu-isu yang sangat sensitif. oleh karena itu Forum Kerukunan Umat Beragama meminta semua pihak untuk selalu aktif dan bijak didalam mengeluarkan, menanggapi ataupun menyikapi isu agama.
3. Bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali didalam mengantisipasi isu-isu agama, didalam menyikapi permasalahan agama, khususnya permasalahan antar agama, selalu berusaha menyelesaikan masalah – masalah yang muncul dengan mengedepankan musyawarah sampai permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali disamping secara cepat harus menyikapi isu-isu antar agama, juga sekaligus meredam penyebaran isu-isu masalah antar agama, terlebih lagi terhadap konflik yang bernuansa antar agama.

5. Bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali didalam menyikapi segala permasalahan antar agama selalu berkeyakinan bahwa dengan musyawarah, pendekatan hati ke hati, permasalahan pada akhirnya pasti akan selesai dengan baik.
6. Bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama didalam menyikapi segala permasalahan antar agama selalu berpedoman dengan beberapa sikap yaitu:
 - Segala masalah antar agama diselesaikan dengan musyawarah dari hati ke hati
 - Masalah yang kecil pantang untuk dibesar-besarkan.
 - Tidak menyebarluaskan masalah-masalah antar agama
 - Masalah yang sudah selesai dengan baik pantang untuk di ungkit-ungkit

Tidak bermain-main dengan isu agama

XXI. BEBERAPA PEDOMAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

1. Semua agama adalah ciptaan Tuhan
2. Semua agama menyembah dan memuja Tuhan yang sama
Semua agama adalah sangat mulia
Semua agama mempunyai tujuan yang mulia
Semua agama mengajarkan tentang membangun dan membina kerukunan bukan saja pada intern umat tetapi antar umat.
3. Semua manusia adalah bersaudara
4. Perbedaan adalah kekayaan dunia yang sangat bermanfaat memperindah dunia.
5. Perbedaan bukanlah pertentangan.
6. Kerukunan dan kebersamaan sangat indah dan sangat menguntungkan. Pertentangan adalah buruk dan sangat merugikan.
7. Sebelum datang dan menetap ke suatu daerah / negara, pelajari dulu adat istiadatnya, budayanya dan hukumnya agar kita bisa menyesuaikan diri
8. Hayati dan amalkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika
9. Hayati dan amalkan pepatah “ dimana bumi dipijak disana langit dijunjung “, Desa kala patra – Desa mawacara.

XXII. KERUKUNAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

1. Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau Negara Kepulauan (Nusantara) yang terdiri dari berbagai suku, agama, sehingga sangat kaya dengan keberagaman adat dan budaya. Keberagaman suku, agama, adat, bahasa dan sebagainya yang menciptakan keberagaman budaya sebenarnya adalah kekayaan Bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Keberagaman suku, agama, adat dan budaya ini dilindungi dan dikelola oleh negara dengan konsep Bhineka Tunggal Ika yang berdasarkan Pancasila.
2. Pancasila dengan motto Bhineka Tunggal Ika adalah Dasar Negara, Ideologi Negara, Pandangan Hidup Bangsa, sebagai Alat Pemersatu Bangsa dan Negara dan sebagai Landasan Etika.
3. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus dihayati, dan diperlihatkan dalam setiap praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah Perjanjian Bangsa, sehingga tidak boleh diubah oleh siapapun dan atau lembaga apapun.
5. Yang berjanji saat itu adalah Daerah - daerah yang sebenarnya bisa menjadi Negara tersendiri yang sering disebut sebagai Yong Aceh, Yong Padang, Yong Sumatera, Yong Sunda, Jawa, Madura, Bali, Celebes, Kalimantan, Ambon, Papua dan sebagainya.
6. Negara dan Pemerintah wajib melindungi, mengayomi, melestarikan daerah-daerah pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segenap tumpah darahnya yaitu agamanya, suku bangsanya, adatnya dan budayanya, tanpa memandang dan atau membedakan dari sudut pandang mayoritas ataupun minoritas. Sebaliknya daerah-daerah harus tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembangunan nasional.
7. Oleh karenanya orangnya, agamanya, adatnya, budayanya, bahasanya harus tetap dominan disetiap daerahnya masing-masing
8. Sangat pentingnya dicantumkan kata "Perlindungan" terhadap agama, adat, budaya dan bahasa daerah.

9. Sangat pentingnya dicantumkan kata "Penerimaan" terhadap perbedaan.
10. Agama-agama, adat-adat, budaya-budaya adalah otonom, sepanjang urusan-urusan agama murni, adat murni dan budaya murni maka Negara dan Pemerintah tidak boleh mengkooptasi atau mengintervensi secara substansial, demikian juga agama-agama, adat-adat dan budaya-budaya tidak boleh mengkooptasi negara.
11. Pancasila sangat selaras dengan agama – agama, adat – adat dan budaya – budaya Nusantara, demikian juga sebaliknya agama – agama, adat – adat dan budaya – budaya Nusantara sangat selaras dengan Pancasila
12. Dari sudut pandang ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika maka masalah-masalah suku bangsa, agama, adat dan budaya tidak boleh didemokrasiakan berdasarkan suara terbanyak, namun harus melalui demokrasi musyawarah mufakat.
13. Yang ber-Bhineka atau Plural adalah Indonesia, bukan daerah-daerah pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Agama dan Demokrasi tidaklah bertentangan, antara keduanya sepatutnya berjalan selaras. Semakin kuat atau semakin kokoh agama yang berarti semakin baik pemahaman terhadap keluhuran nilai-nilai agama maka semakin baik kualitas demokrasi. Karena agama adalah dasar kecerdasan dan kesejahteraan. Kecerdasan dan kesejahteraan adalah dasarnya demokrasi.
16. Tindakan – tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan demokrasi atau yang menjadi lawan demokrasi antara lain : tindakan kekerasan, intimidasi, penindasan, pembelengguan atau pengekangan terhadap Hak asasi secara berlebihan dan tanpa dasar hukum. Tindakan – tindakan demikian adalah juga bertentangan dengan Hukum Universal, dan juga bertentangan dengan agama – agama.

CURICULUM VITAE

Nama : Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet
Nama Sebelum Peadegan : Ida Idewa Gede Ngurah Swastha, SH
Jabatan : - Pangelingsir Agung Ksatria Dalem Treh Ida Idewa Sumretha
: - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali
: - Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia
: - President Apenindo (Indonesia Aviation Expert)

Aktivitas Sosial :

Pemerhati masalah Hukum, Politik, Penerbangan, Agama dan Sosial Budaya.

Sebagai Pembicara pada berbagai Seminar.

Alamat : - Puri Den Bencingah, Jalan Pulau Adi 51, Denpasar 80114 - Bali - Indonesia
: - Puri Den Bencingah, Jalan Raya Besakih No.16, Semarapura - Bali - Indonesia

Organisasi Sosial :

1. Ketua Umum Himpunan "Air Traffic Controller" Indonesia (HATCI) 1989-1994.
2. Ketua Umum Forum Pemerhati Hindu Dharma Pusat 1994-2002 (Dua periode).
3. Anggota Litbang Parisada Hindu Dharma Pusat 1996 – 2001
4. Anggota Lembaga Pengkajian Budaya Bali / Society for Balinese Studies (SBS) 1994 – 1998)
5. Ketua Tim Seleksi Calon KPU Bali 2003.
6. Anggota Badan Koordinasi Pengamanan Bali (BKPB) tahun 2006
7. Nayaka Majelis Utama Desa Pekraman Bali Periode 2004-2009.
8. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Sejak 1997
9. Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Sejak 2008
10. Ketua Tim Seleksi Calon KPU Bali 2008
11. Petajuh Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman Sejak 2009
12. Pendiri Yayasan Waturenggong (The Waturenggong Foundation)
13. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali sejak 2014
14. Panglingsir Agung Ksatria Dalem Treh Ida Idewa Sumretha
15. Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia Sejak 12 juni 2016
16. President Apenindo (Indonesia Aviation Expert)

Penghargaan : Memperoleh Lempad Prize dari Sanggar Dewata Indonesia 1998.

Denpasar, 9 Maret 2017



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet